



**Alfriadi Dwi Atmoko, SE MSi Ak CA**  
Dosen Akuntansi  
Universitas Amikom Yogyakarta

Atas disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membuat desa dapat mengembangkan ekonominya secara mandiri

melalui pembentukan BUMDes. Menurut PP No 11 Tahun 2021 BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Saat ini Indonesia memiliki 83.381 desa (Data Dukcapil Kemendagri, Per Juni 2021). Namun berdasarkan data dari Kementerian Desa PDTT (bumdes.kemendesa.go.id per Maret 2023), baru

terdapat 12.945 BUMDes yang telah resmi berbadan hukum dan tidak semua BUMDes tersebut aktif. Padahal BUMDes dapat digunakan sebagai sumber penghasilan bagi desa dan dapat meningkatkan kemandirian desa serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pada dasarnya setiap desa memiliki aset yang dapat menjadi peluang untuk dimanfaatkan. Aset tersebut diantaranya adalah tanah, kolam, sawah, perkebunan, sumber air, sungai dan sebagainya. Dalam mengelola aset tersebut, desa dapat membangun BUMDes sebagai

pengembang usaha dan juga dapat membangun desa secara mandiri. Kemandirian desa dapat tercipta apabila suatu desa dapat membiayai kebutuhannya sendiri dengan PADes.

Potensi yang dimiliki oleh desa sangat besar apabila desa tersebut dapat memanfaatkan dan mengelola menjadi nilai yang lebih ekonomis. Bahkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu desa dapat naik. Bukan hanya dapat menyerap tenaga kerja saja, BUMDes juga dapat menjadi daya tarik

wisatawan lokal bahkan luar daerah sehingga terdapat aliran kas masuk ke Desa melalui BUMDes tersebut dan roda perekonomian di Desa tersebut dapat bergerak.

Namun untuk dapat menciptakan BUMDes yang dapat memberikan nilai ekonomis yang tinggi diperlukan komitmen para stakeholders diantaranya perangkat desa sebagai pelindung, pengurus BUMDes serta masyarakat sekitar dan masyarakat luas untuk bersama-sama membangun BUMDes tersebut. Tidak lupa peran perguruan tinggi juga sangat penting dilihat dari aspek akademis mampu mendorong terciptanya

BUMDes yang dapat berjalan dengan baik. Peran perguruan tinggi sangat diperlukan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada BUMDes.

Permasalahan yang sering ada dalam BUMDes yaitu tata kelola manajemen, pengelolaan profiling BUMDes, manajemen pemasaran, sistem akuntansi dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut bahkan dengan mudah dapat diselesaikan dengan hadirnya perguruan tinggi di BUMDes. Sehingga BUMDes menjadi peluang yang besar untuk perguruan tinggi dapat melakukan Tri Dharma



seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adanya peluang untuk masuknya perguruan tinggi dapat dibuat kerja sama antar BUMDes dan perguruan tinggi untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh BUMDes. Atas kerja sama tersebut memberikan sinergi antara BUMDes dengan perguruan tinggi dan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Desa sehingga Desa mampu menggerakkan roda perekonomian secara mandiri.

## Potensi Desa dengan BUMDes

## KASUS SUAP SEKRETARIS MA KPK Periksa Hakim Agung Prim Haryadi

**JAKARTA (KR)** - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil memeriksa Hakim Agung Prim Haryadi sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan (HH). Sebelumnya KPK meminta Ketua MA Muhammad Syarifuddin untuk menginstruksikan kepada jajaran pejabat MA untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, informasi yang diterima membenarkan Hakim Agung Prim Haryadi sudah memenuhi pa-

nggilan. "Benar ya, saksi Prim Haryadi sudah hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada hari ini dan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK dan telah selesai," jelasnya di Jakarta, Kamis (8/6).

Namun Ali tidak bisa menjelaskan secara rinci soal pemeriksaan terhadap Prim Haryadi oleh penyidik. Pasalnya, untuk detail pemeriksaan tersebut nantinya akan dijelaskan secara terbuka pada proses persidangan.

Selanjutnya Ali memberikan konfirmasi bahwa Prim Haryadi diperiksa terkait relasi antara Hasbi Hasan dan mantan Komisaris PT Wika Beton

Dadan Tri Yudianto (DTY), yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Untuk itu, saksi dikonfirmasi pengetahuannya antara lain adanya informasi terkait dugaan DTY melalui HH pernah mencoba melobi saksi agar memenuhi keinginan Heryanto Tanaka terkait putusan perkara yang sedang diurusnya di MA.

Atas kehadiran saksi, Ali menyapaikan apresiasi dan berharap saksi-saksi lainnya yang dipanggil penyidik KPK juga bersikap kooperatif. "Ini agar proses penyidikan perkara ini dapat segera selesai dan berkepastian hukum," tuturnya, **(Ful)-d**

## Laka Maut Renggut ASN Temanggung

**TEMANGGUNG (KR)** - Mobil rombongan staf Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung bertabrakan dengan sebuah truk pengangkut semen di Jalan Raya Kedu Dusun Ngjingan Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Temanggung, Kamis (8/6). Satu ASN, bernama Muhammad Isa Ansoni meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara dua staf lainnya yakni Atik Mazhumi dan Saroji menderita luka dan dalam perawatan di RSUD Temanggung.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto mengatakan, telah melaporkan kejadian kecelakaan (laka) tersebut kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda Temanggung. "Kejadian ini ditangani Polres Temanggung, sementara korban meninggal dunia dimakamkan di Gedungan RT 3 RW 5 Sinduadi Mlati Sleman," katanya.

Sebelumnya, rombongan ASN tersebut usai melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di sejumlah kecamatan, di antaranya di Candiroto dan Bejen.

Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi mengatakan, kecelakaan terjadi berdasarkan rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi menggambarkan truk semen berjalan dari arah Semarang menuju Parakan. "Namun dari jalur berlawanan melaju mobil Terios putih masuk ke jalur truk hingga kemudian terjadi tabrakan," katanya.

Ia mengatakan, kendaraan Terios putih AA 1660 IE yang melaju itu mengambil jalur kanan dan kemungkinan pengemudinya mengantuk, sehingga menabrak sisi kiri truk. **(Osy)-d**

## Sensus

polemik terkait data pertanian, khususnya dalam ketersediaan cadangan beras dalam negeri. Diharapkan, sensus pertanian ini akan menjadi solusi dari polemik data per-berasan di Indonesia.

Polemik data, kalau kita tarik kebelakang awalnya adalah swasembada beras, yang sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa kita. Karena sudah dua kali bangsa ini mendapat pengakuan dan penghargaan dari Badan Pangan Dunia (FAO) dan Lembaga Riset berkelas dunia sekaligus IIRI, sebagai negeri yang mampu meraih swasembada beras. Pertama di tahun 1984 yang dikukuhkan dalam Sidang Tahunan FAO di Roma, Itali. Kedua tahun 2022 yang pengukuhan di Jakarta dan diterima langsung Presiden Jokowi. Kian membanggakan lagi, selama 3 tahun (2019-2021) secara berturut-turut, Indonesia mampu menutup kran impor beras dan berhasil mengandalkan kebutuhan beras dari hasil produksi yang dihasilkan petani-petani dalam negeri.

Tetapi, kita dikejutkan di akhir tahun 2022 adanya impor beras sebesar 500 ribu ton. Sehingga menjadi tanda tanya di masyarakat apakah swasembada beras yang selama ini diakui FAO dan IIRI benar-benar terjadi

di Indonesia? Ataukah hanya upaya untuk mendongkrak citra pemerintah dalam hal pangan? Karena kita tahu soal beras dan pangan ini akan berhubungan langsung dengan kehidupan warga bangsa. Dan beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang harus tersedia.

Perlu diketahui, impor 500 ribu ton, masih bisa dikatakan bahwa Indonesia swasembada beras. Karena dari 30 juta ton beras kebutuhan bangsa tahun 2022, kita hanya mengadakan impor khusus sebesar 500 ribu ton. Kemudian FAO sendiri mendefinisikan swasembada itu apabila produksi dalam negeri dapat memenuhi 90% dari kebutuhan nasional. Kalau kebutuhan 30 juta ton beras, berapa 10% nya? Maka mengimpor 500 ribu ton, jelas masih memenuhi kriteria swasembada.

Kemudian di awal tahun juga ada rencana impor beras sebesar 2 juta ton karena Pemerintah menyiapkan sebanyak 10 kg beras sebagai bansos untuk 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan digelontorkan selama 3 bulan, mulai bulan Maret - Mei 2023. Padahal kita tahu di bulan Januari - April 2023 banyak panen raya yang diperkirakan bisa menutupi ketersediaan cadangan beras di Indonesia. Tapi ternyata hal

tersebut tidak cukup menutupi kekurangan, sehingga harus impor untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Kunci dari ketersediaan beras yang ada adalah dari hasil produksi petani di dalam negeri dan cadangan beras pemerintah yang dimiliki. Secara teori, proyeksi mengatakan produksi padi ditengarai akan meningkat, tetapi bagaimana dengan kenyataan di lapangan? Semua pertanyaan ini bisa dijawab dengan tegas apabila kita memiliki data yang akurat, tepat dan berkualitas.

Data beras yang berkualitas, riil dan akurat benar-benar kita butuhkan saat ini. Semoga Sensus Pertanian 2023 mampu memberi solusi atas terjadinya kekisruhan data produksi beras yang sampai saat ini masih sering diperdebatkan berbagai pihak. Secara data dan angka, Sensus Pertanian 2023, mestinya mampu memberi keyakinan kepada kita bersama, bagaimana potret terkini pertanian termasuk petaninya. Baik dari sisi sumberdaya maupun kesejahteraannya. Hal yang lebih penting lagi adalah memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa, bangsa kita masih layak disebut sebagai negara swasembada beras. **(Penulis adalah Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM)-f**

## Mega

di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6).

Perintah pertama, meminta kader memperhebat kerja gotong-royong Tiga Pilar Partai, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif, bersama pemerintahan Presiden Jokowi-KH Ma'ruf Amin di dalam memerangi kemiskinan ekstrem.

Megawati meminta seluruh anggota dan kader partai untuk menyiapkan seluruh tahapan Pemilu dengan detail. "Siapkan juru kampanye yang terbaik. Siapkan saksi yang militan dengan kecakapan tinggi, dan ketuklah pintu-pintu rakyat melalui sebuah gerakan, yaitu dari pintu ke pintu dengan sopan," kata Megawati.

Ketiga, ia meminta kader untuk turun ke bawah bersama rakyat. "Satukan jiwamu, hatimu, dan segenap akal budimu, dengan menyatu dengan rakyat. Itulah syarat terpenting menang Pemilu," kata Megawati.

Perintah keempat, Megawati meminta seluruh jajaran kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota legislatif, memersembahkan kinerja politik terbaik dengan mendorong penciptaan lapangan kerja, bantuan sosial bagi rakyat miskin, dan bangun semangat juang untuk hidup lebih baik dan bermartabat.

Kelima, Megawati memerintahkan seluruh calon anggota legislatif di seluruh tingkatan agar segera bergerak dan menjadikan diri sebagai mesin pergerakan kemenangan yang mandiri, pantang menyerah, dan cakap di dalam kerja politik kerakyatan.

Lebih lanjut Mega meminta kader mensosialisasikan calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo ke seluruh pelosok negeri. "Tampilkanlah Pak Ganjar apa adanya, autentik, rasional, dan sesuai dengan karakternya yang menyatu dengan rakyat. Sebab,

kata Bung Karno, persatuan dengan rakyat adalah senjata yang mahadahsyat," katanya.

Perintah ketujuh, Megawati mengajak kader bergotong-royong dengan penuh semangat dan satukan Tiga Pilar Partai sebagai mesin terbaik pemenangan Pemilu 2024.

Sedangkan hasil Rakernas antara lain merekomendasikan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam satu periode dari 6 menjadi 9 tahun, namun periode kepemimpinannya dikurangi dari 3 menjadi 2 kali.

"PDI Perjuangan mendorong stabilitas dan kesinambungan pemerintahan desa dengan mengupayakan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun untuk 3 periode, menjadi 9 tahun untuk 2 periode dengan melakukan perubahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. **(Ant)-d**

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

## MANTAN WAKIL KETUA KPK DATANGI DPR Korupsi BTS, Selesaikan Secara Holistik

**JAKARTA (KR)** - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kedatangan mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang ke Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (8/6), untuk membahas terkait dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS). Dasco mengaku tidak permasalahan kedatangan Saut ke Komisi III DPR RI. Sebab kondisi seperti itu sudah ada mekanisme yang mengaturnya.

"Saya baru dapat informasi bahwa yang bersangkutan akan membuat surat ke Komisi III. Nanti, mekanisme di komisi teknis itu yang akan kemudian dilakukan sesuai dengan tata tertib (tatib) yang ada di DPR," jelas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (8/6).

Namun Dasco akan terlebih dulu melakukan rapat. Kemudian, apabila ada masukan-masukan untuk laporan tersebut, maka mekanismenya ada di Komisi III DPR RI. "Mengenai tindak lanjutnya itu juga ada mekanisme sendiri yang kami akan serahkan ke Komisi III," imbuhnya.

Sementara itu, Saut Situmorang menyambangi Komisi III DPR RI guna membahas secara permasalahan korupsi BTS diselesaikan secara holistik atau tuntas secara keseluruhan.

"Saya sekarang ke Komisi III untuk kasus yang sama. Dia (Ketua MAKI Bonyamin) pendekatan di Komisi I, saya pendekatannya di Komisi III. Intinya adalah kami ingin (kasus korupsi) BTS ini diselesaikan secara holistik," katanya.

Saut tidak ingin penyelesaian kasus tersebut hanya melihat pada latar belakang seseorang. Oleh karena itu, kedatangannya ke Komisi III DPR untuk mendorong agar DPR berdialog dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya dugaan kasus korupsi BTS menjadi jelas.

"Kami harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto, Ketua Komisi III DPR), itu kasus Sambo itu juga jelas setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi, kami harus lakukan model dialog yang sama," tuturnya. **(Ant/Has)-d**

## 29.069 Calon PPPK Kemenag Diminta Siapkan Pemberkasan

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil akhir seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahun anggaran 2022, Kamis (8/6). Pengumuman hasil akhir seleksi ini dapat diakses pada laman kemenag.go.id dan Kemenag SupperApps PUSA-KA.

"Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi dan melalui masa sanggah, diumumkan ada 29.069 peserta yang lulus seleksi calon PPPK Kemenag," terang Sekjen yang juga Ketua Panitia Seleksi PPPK Kemenag, Nizar di Jakarta, Kamis (8/6).

Menurut Nizar, panitia seleksi telah meninjau, menelaah dan menjawab sanggahan para peserta CPPPK Kemenag Formasi Tahun Anggaran 2022. "Jawaban sanggah dapat diakses para pelamar yang mengajukan sanggah melalui akun SSCASN masing-

masing," ujar Nizar. Ia menyampaikan, peserta yang dinyatakan lulus seleksi calon PPPK Kemenag adalah mereka yang memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Selain itu, mereka juga memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) atau Passing Grade (PG) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Nurudin menjelaskan, bagi Peserta yang lulus wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik pada akun SSCASN masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

Nurudin juga menyampaikan, seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, kelulusan adalah berdasarkan kompetensi peserta. **(Obi)-d**

## Ganjar

untuk memperlancar aliran air.

Senada, Kepala Dusun Bambang Rohmat mengatakan, sebelum ada bantuan instalasi air bersih, warga mengambil air bersih di Desa Serang atau membelinya. Bahkan warga terpaksa mandi seminggu sekali karena sulitnya mendapat air bersih. "Alhamdulillah, sekarang sudah bermanfaat airnya dari sumbangan Pak Gubernur. Sangat bermanfaat, nggak beli lagi, bisa mandi. Dulu mandi jarang, untuk makan saja susah," kata Rohmat.

Kini, sekitar 1.200 warga Dusun Bambang telah menikmati air bersih dari bantuan Pemprov Jateng. Warga pun bisa berhemat lebih banyak, karena tidak perlu beli air lagi. "Setelah dibangun jaringan air bersih, warga cukup

membayar air sesuai penggunaannya. Rata-rata Rp 50.000-Rp 70.000 per rumah setiap bulan sebagai biaya ganti perawatan jaringan. Warga pun bisa menghemat pengeluaran dan bisa untuk kebutuhan yang lain," tutur Rohmat.

Dirah, warga Dusun Bambang, Desa Kutabawa mengaku senang karena tak lagi kesulitan air bersih. Ia tak perlu lagi pergi ke desa tetangga untuk mendapatkan air bersih maupun beli air untuk kebutuhan sehari-hari.

Sumarni, warga Bambang lainnya mengatakan, saat ini dia hanya fokus bekerja sebagai pedagang tanpa khawatir tidak mendapat air bersih. Sekarang tinggal mencari uang untuk bayar setiap bulannya sekitar Rp 300.000, karena untuk kebutuhan warung juga. **(Bdi)-d**

## 15 Juta

Sambungan hal 1

ekonomi sudah meningkat, atau alasan lain. Bisa juga terkait masalah teknis dan lebih banyak kesalahan di pemerintah seperti ketidakcocokan data antara kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Jangan sampai pemerintah yang bermasalah, tetapi masyarakat yang menanggung akibatnya. Tidak boleh terjadi seperti itu. Transparansi informasi memang sangat penting dalam tata kelola kepesertaan BPJS Kesehatan," tandas Robert. **(Ant/Has)-f**



Prakiraan Cuaca			Jumat, 9 Juni 2023		
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☀	☁	23-31	70-95
Sleman	☁	☀	☁	23-30	75-95
Wates	☁	☀	☁	23-31	70-95
Wonosari	☁	☀	☁	23-30	70-95
Yogyakarta	☁	☀	☁	23-31	70-95
Cerah	☀	☀	☀		
Berawan	☁	☁	☁		
Udara Kabur	☁	☁	☁		
Hujan Lokal	☁	☁	☁		
Hujan Pelir	☁	☁	☁		